

## Mario Dandy Ajukan Kasasi Atas Vonis 12 Tahun Penjara

JAKARTA (IM) – Mario Dandy Satriyo, terdakwa kasus penganiayaan terjadap seorang remaja berinisial D (17), mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas vonis 12 tahun yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Betul (Mario ajukan kasasi),” ujar Pejabat Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyanto saat dikonfirmasi, Kamis (11/1).

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, kepada Mario, sebelumnya.

Berkas kasasi Mario telah dikirim sejak 5 Desember 2023. “Nomor Surat Pengiriman Berkas kasasi W10-U3/23310/HK.01/12/2023,” tulis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan memperkuat

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada Mario Dandy Satriyo.

“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 297/Pid.B/2023/PN JK1.SEL tertanggal 7 September yang dipintakan banding tersebut,” kata Hakim Ketua Tony Pribadi dalam sidang banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kamis (19/10).

Untuk diketahui, Mario Dandy Satriyo merupakan anak mantan pejabat Direktorat Pajak Kementerian Keuangan RI, Rafael Alun Trisambodo.

Mario menganiaya korban D pada 20 Februari 2023 di Kompleks Green Permata, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Mario marah karena mendengar kabar dari saksi bernama Amanda (19) yang menyebut AG yang dulu merupakan kekasihnya, mendapat perlakuan tidak baik dari korban. ● han

# 2 | Polhukam

IDN/ANTARA



## KONSOLIDASI RELAWAN PRABOWO-GIBRAN DI BENGKULU

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa relawan saat menghadiri konsolidasi pemenangan Prabowo-Gibran di Kota Bengkulu, Kamis (11/1). Dalam konsolidasi tersebut, Prabowo berjanji akan menghapus kemiskinan, serta melanjutkan kebijakan hilirisasi Presiden Jokowi dan memberi makan siang gratis kepada para siswa juga santri di seluruh Tanah Air.

## Bukti Sudah Cukup, KPK Segera Tentukan Tersangka Pungli di Rutan

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebut pihaknya sudah menemukan bukti yang cukup untuk menentukan tersangka kasus Pungli di Rutan KPK.

JAKARTA (IM) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menentukan tersangka kasus pungutan liar atau pungli di Rutan KPK. Sebab bukti adanya pungli di Rutan KPK dinilai sudah cukup.

Sebanyak 190 orang telah diperiksa tim penyelidik. Kemudian 93 orang diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

“190-an orang yang sudah diminta keterangan dari pihak pegawai KPK dan juga pihak luar,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/1).

Alex mengatakan bahwa kasus pungli rutan itu masih dalam tahap penyelidikan. Memang sudah ada temuan barang bukti untuk menentukan sosok tersangka. Saat ini

penyidik tinggal melakukan gelar perkara saja.

“Dari proses penyelidikan sudah cukup, dua alat bukti itu sudah cukup, tinggal kita tunggu ekspose saja. Itu perkara yang terang benderang, lebih terang dari sinar matahari,” ujar Alex.

Alex juga membantah penyelidikan pungli di rutan KPK terkesan jalan di tempat. Dia mengatakan butuh proses karena banyaknya saksi yang diperiksa.

“Karena banyak melibatkan orang, kan gitu. 190 orang tadi diperiksa. Itu yang nerima duit ada 50 orang lebih apa,” katanya.

### Disidang Etik

Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengungkap perkembangan terbaru terkait kasus pungutan liar atau

pungli di Rutan KPK. Kasus itu segera naik ke sidang etik.

“Pungli sudah mau sidang,” kata anggota Dewas KPK, Albertina Ho di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan.

Albertina juga mengungkapkan keterlibatan pegawai KPK dalam kasus tersebut. Dia menyebut ada 93 pegawai KPK yang akan disidang etik terkait pungli Rutan KPK.

“93 orang yang akan naik sidang etik,” katanya.

Dewas KPK mengatakan sidang etik kepada 93 pegawai itu akan digelar bulan ini. Dewas KPK menyerahkan perkara pidana dari kasus pungli itu kepada penegak hukum lain.

“Tapi yang untuk nilai itu jelasnya pidananya ya. Kalau kita di etik ada nilai-nilanya juga, tapi kan kita terlalu mendalam masalah nilai ya,” katanya.

Meski demikian, Albertina tidak mengungkap identitas pegawai KPK yang akan menjalani sidang etik tersebut. “Direncanakan bulan ini,” ujarnya.

Sejauh ini, Dewas KPK menemukan besaran pungli lebih besar dari temuan awal, yakni Rp4 miliar.

“Niainya lebih, tapi yang

untuk nilai itu jelasnya pidananya ya. Kalau kita di etik ada nilai-nilanya juga tapi kan kita terlalu mendalam masalah nilai ya,” ujarnya. ● mar



IDN/ANTARA

TARGET PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU 2024 Warga mengamati baliho pasangan capres - cawapres RI Pemilu 2024 di pinggir jalan Kertek, Wonosobo, Jateng, Kamis (11/1). KPU RI menargetkan partisipasi pemilih Pemilu 2024 secara nasional sekitar 79,5 persen.

## Dua Pimpinan KPK Dilaporkan ke Dewas soal Pelanggaran Etik

JAKARTA (IM) – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menerima laporan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan dua pimpinan lembaga antirasuah. Hal ini diungkap Anggota Dewas KPK, Albertina Ho.

Sebelumnya, Dewas KPK telah memeriksa Firli Bahuri, saat menjabat Ketua KPK.

“Seingat saya sih dua (pimpinan KPK yang dilaporkan),” kata Albertina kepada wartawan, Kamis (11/2).

Namun Albertina menolak menjelaskan lebih jauh tentang laporan tersebut. Pasalnya, laporan tersebut masih didalam dalam tahap awal.

Sebelumnya, Dewan Pengawas (Dewas) Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Syarul Yasin Limpo (SYL).

Mantan Menteri Pertanian (Mentan) itu enggan membeber materi apa yang dikonfirmasi pada dirinya.

“Saya tentu nggak berkompeten (ungkap isi pemeriksaan),” kata SYL di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Rabu (10/1).

Di hari yang sama, Dewas juga memeriksa mantan Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan), Kasdi Subagyono. Sama dengan SYL, Kasdi pun enggan banyak memberikan komentar.

“Dewas aja ditanyakan. (Pemeriksaan) masih etik, tapi selanjutnya sudah saya jelaskan semua,” ujar Kasdi. ● han

## Respon KPU Soal Aliran Dana dari Luar Negeri ke 21 Parpol

JAKARTA (IM) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tentang adanya aliran dana dari luar negeri senilai Rp195 miliar ke 21 bendahara partai politik (parpol) sepanjang 2022-2023.

PPATK mengendus adanya peningkatan transaksi dari 21 partai politik dalam rentang 2022-2023. Pada 2022, PPATK mengidentifikasi 8.270 transaksi. Kemudian, jumlah transaksi meningkat menjadi 9.164 pada tahun 2023.

Kendati meningkatnya transaksi keuangan itu, PPATK mengkalkulasi total penerimaan uang dari luar negeri ke 21 rekening bendahara parpol senilai Rp195 miliar.

Sejauh ini PPATK tak mengungkap identitas bendahara parpol yang menerima aliran dana tersebut.

Komisian KPU RI August Mellaz mengatakan pihaknya masih menunggu laporan resmi dari PPATK terkait temuan itu ke pihaknya.

“Itu PPATK, yang jelas apakah itu dilaporkan ke KPU? KPU kan melaporkan apa yang dilaporkan,” kata Mellaz saat ditemui di kantornya, Rabu (10/1).

Mellaz mengaku bahwa pihaknya kerap berkoordinasi dengan PPATK kala menemukan aliran dana mencurigakan. Hanya saja, kata Mellaz bukan terkait temuan PPATK soal aliran dana dari luar negeri ke 21 bendahara parpol.

“Kalau informasi (temuan PPATK) itu kami sering dapat. Kami juga pernah dapat surat. Ada di awal awal Desember, saya lupa persisnya, itu menyangkut beberapa hal bahwa kan ada koordinasi antara KPU dengan PPATK,” kata Mellaz.

“Kan ada informasi yang disampaikan ke kami oleh PPATK, misalnya terkait dengan koordinasi saya lupa istilahnya, tapi misalnya safe deposit, pasti ada laporan itu. Tapi berapa nilainya itu berapa nah keliatannya detail-detail itu malah ada di Bawaslu karena memang konteks pengawasan,” ujarnya. ● han

## Prabowo Tegaskan Tak Pernah Gentar Hadapi Para Koruptor dan Antek Asing

BENGKULU (IM) – Calon presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak pernah takut menghadapi para koruptor hingga antek asing di Indonesia. Ditegaskannya, pasangan nomor urut 2 Prabowo-Gibran Rakabuming Raka hadir untuk rakyat.

Prabowo menyampaikan hal ini saat menghadiri konsolidasi relawan Prabowo-Gibran di Bengkulu, Kamis (11/1). “Hei maling-maling, koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar

terhadap kalian. Hei kaum munafik, hei antek-antek asing, Prabowo-Gibran bersama rakyat Indonesia!” ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan, saat ini Indonesia berada di sebuah persimpangan jalan untuk memilih apakah mereka ingin menjadi negara maju atau tidak.

Dia mengingatkan Indonesia menjadi negara yang makmur dan adil, di mana semua rakyatnya hidup dengan sejahtera.

“Tidak ada kemiskinan lagi. Negara di mana koruptor-koruptor akan kita usir.

Negara di mana kekayaan yang begitu besar diberi kekuasaan kepada kita semua, akan dijaga, diurus, dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tuturnya.

Prabowo menyebut sudah mengumpulkan orang-orang terbaik untuk mengurus Indonesia. Mereka adalah putra-putri terbaik berhati tulus dan ikhlas.

“Bukan munafik-munafik yang kami kumpulkan. Kami sudah punya program. Kami sudah punya strategi yang kami beri nama strategi transformasi bangsa,” kata Prabowo tegas. ● han



IDN/ANTARA

PENINDAKAN KASUS PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KUDUS Petugas Bea Cukai Kudus, Jateng, Kamis (11/1). Bea Cukai Kudus selama 023 mengungkap 181 kasus peredaran rokok ilegal berbagai modus, dengan 18 tersangka yang telah disidangkan dengan jumlah barang bukti rokok ilegal sebanyak 19.610.236 batang (senilai Rp24,6 miliar) dengan potensi kerugian negara sebesar Rp17 miliar.

## Ganjar Pranowo Buka Peluang untuk Merevisi UU Cipta Kerja

TEGAL (IM) – Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja apabila terpilih menjadi presiden kelak.

Menurutnya, evaluasi terhadap UU Cipta Kerja adalah salah satu aspirasi yang ia dapatkan saat bersilaturahmi dengan buruh yang tergabung dalam Relawan Buruh Sahabat Ganjar di Tegal, Rabu (10/1) malam.

“Ya sangat mungkin (revisi UU Cipta Kerja), kalau memang aturan sudah bagus tentu tidak. Tapi kalau ada perkembangan yang dinamis ya bukan tidak mungkin,” kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) ini menuturkan, ada sejumlah isu dalam UU Cipta Kerja yang dipersiapkan oleh para buruh, salah satunya buruh meminta agar perhitungan pesangon kembali pada perhitungan

awal sebelum ada UU Cipta Kerja.

Selain itu, para buruh juga mempersoalkan status pekerja agar tidak melulu menjadi pegawai kontrak serta masalah perumahan bagi para pekerja.

“Mereka sedang saya minta (gagasannya) untuk coba pikirkanmu kira-kira seperti apa, siapkan dalam bentuk tertulis agar kemudian nanti bisa bertemu tim saya untuk bisa mereformulasi,” kata Ganjar.

Politikus PDI-P ini juga berpesan kepada para buruh untuk menjaga hubungan baik dengan pengusaha agar mendapatkan jalan tengah dalam mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan.

“Saya titip juga ketika kita ingin membangun ekonomi maka antara pengusahaan dengan buruh ini punya relasi yang cukup bagus gitu ya, agar menciptakan hubungan win-win,” ujar Ganjar. ● me

PENGUMUMAN  
PT KREATIF GRAHA PICTURES  
Berkedudukan di Jakarta Pusat  
("Perseroan")

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang Perseroan Terbatas"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 5 Januari 2024, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Kreatif Graha Pictures Nomor 01 tanggal 5 Januari 2024 dibuat di hadapan Arundina Larasati S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karanganyar, telah diambil keputusan untuk melakukan pengurangan modal ditempatkan dari sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp.9.900.000.000,- (sembilan milyar sembilan ratus juta Rupiah).

Sehubungan dengan keputusan pengurangan modal disetor dan ditempatkan Perseroan tersebut di atas, merujuk pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, apabila terdapat kreditur Perseroan yang memiliki keberatan dapat mengajukannya secara tertulis dengan disertai alasan dan bukti pendukung yang sah kepada Direksi Perseroan ke alamat: The Peak Royale Springhill Ruko No 10, Jalan Benyamin Sueb Blok D7, Kota Administrasi, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 12 Januari 2024  
Direksi Perseroan